



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

PERANAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Jefri

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jalan Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas Jake Teluk Kuantan
Email: j3fri262@gmail.com

ABSTRACT

Disability is a condition of physical, mental, intellectual, or sensory limitations experienced by an individual over a long period that can cause barriers and difficulties in fully and effectively participating in community life. Disability is not only an individual issue but also a social issue that requires support and adjustments from the surrounding environment. The aim of this research is to understand the role of the Social Service for Community Empowerment and Villages in empowering persons with disabilities in Teluk Kuantan City, Kuantan Singingi Regency. This research was conducted at the Social Service for Community Empowerment and Village of Kuantan Singingi Regency. The research method used is qualitative research, with data collection techniques being interviews, observation, and documentation. Based on the research findings, it is known that the role of the Social Service for Community Empowerment and Village in empowering persons with disabilities in Teluk Kuantan City, Kuantan Singingi Regency has been good; the Social Service has had a positive impact on improving the quality of life for persons with disabilities in Teluk Kuantan City, Kuantan Singingi Regency.

Keywords: Role of the Social Service, Empowerment, Persons with Disabilities

ABSTRAK

Disabilitas adalah kondisi keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dialami seseorang dalam jangka waktu lama yang dapat menyebabkan hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Disabilitas bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sosial yang memerlukan dukungan dan penyesuaian dari lingkungan sekitar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pemberdayaan penyandang disabilitas yang ada di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik, Dinas Sosial sudah memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Kata Kunci : Peranan Dinas Sosial, Pemberdayaan, Penyandang Disabilitas

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan salah satu unsur yang berperan penting dalam mencapai tujuan suatu negara. Disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, alinea keempat, mengamanatkan bahwa pemerintah negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kedamaian abadi dan keadilan sosial. Pemerintah juga merupakan salah satu unsur yang sangat berperan penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tujuan pembangunan nasional akan terwujud apabila pemerintah dan masyarakat saling bekerjasama dalam proses pembangunan, termaksud dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Setiap orang di dunia ini dilahirkan dengan berbagai perbedaan. Tidak ada Seorang pun yang terlahir sama meskipun mereka adalah kembar. Perbedaan tersebut bisa melalui perbedaan fisik maupun non-fisik. Merupakan hal yang wajar jika kita berbeda dalam segala hal, contohnya perbedaan warna kulit, bentuk fisik, kecerdasan dan perbedaan-perbedaan lainnya. Oleh karena itu, bukan hal yang mengherankan jika dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai banyak saudara-saudara kita yang merupakan penyandang disabilitas (Rofiq, 2021:1).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini dari aspek teoritis adalah Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan Sebagai Bahan acuan, data serta referensi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan pemikiran mengenai masalah Sosial di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya Penyandang Disabilitas.

1.4.2 Secara Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah, di harapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah Terutama mengenai Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Dan diharapkan penelitian ini menjadi pertimbangan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengembangkan kebijakan agar lebih efektif.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Administrasi negara

Administrasi Negara Merupakan ilmu yang mempelajari tentang pelayanan public dalam mengurus urusan Negara. Pelayanan Public merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan public sebagai indikator penting dalam penelitian kinerja pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah. Ilmu Administrasi negara memiliki ruang lingkup sangat luas.

Ilmu Administrasi Negara menurut Sugiyono (dalam Jamaluddin 2015:100) mengajarkan bahwa pemerintahan negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan pada hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*), dan dari dua fungsi ini menyangkut dengan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

2.1.2 Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan dan organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Lasswell dan Kaplan melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan yang berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktik. Friedrich mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan, sasaran, atau kehendak (Said Zainal Abidin, 2019 : 6)

2.1.3 Teori Organisasi

Teori organisasi adalah teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi, salah satu kajian teori organisasi, diantaranya membahas tentang



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi tersebut. Selain itu, dipelajari bagaimana sebuah organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang didalamnya maupun lingkungan kerja organisasi tersebut.

Organisasi merupakan suatu kelompok orang dalam suatu wadah yang memiliki tujuann bersama. Menurut John D. Millet (dalam Syafiie dan Welasari 2015: 71) organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.

2.1.4 Teori Peranan

Peranan menurut Soekanto (dalam Hasan 2021:24) ialah merupakan salah satu aspek dinamis dalam kedudukan (status) individu khususnya apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka dari itu ia menjalankan suatu peranan yang melekat padanya. Peranan juga merupakan perangkat harapan-harapan yang lekatkan pada seorang individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Maka dari itu dapat diketahui bahwa setiap individu pasti memiliki peranan tersendiri sesuai dengan statusnya pada satu lingkungan baik itu lingkungan sosial dan organisasi.

Menurut Soekanto (dalam Rauf dan Munaf, 2015:281) peranan adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan (status), apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Selanjutnya Giroth (dalam Rauf dan Munaf, 2015:281) juga berpendapat hampir sama dengan Soekanto, bahwa “Peranan adalah merupakan sekumpulan fungsi yang dilakukan oleh seseorang sebagian tanggapan terhadap harapan-harapan dari para anggota penting dalam system sosial yang bersangkutan dan harapanya sendiri dari suatu jabatan yang di dudukinya dalam sistem sosial tersebut.

2.1.5 Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan hal yang mutlak dilakukan guna mencetak sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan pembangunan. Dengan sumber daya manusia yang baik dan memadai maka pelaksanaan pembangunan akan semakin lancar dalam berbagai sektor. Dibutuhkan kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah hendaknya memperhatikan hal tersebut terlebih jika memandang manusia merupakan subjek dan objek pembangunan, sehingga pembangunan manusia yang kemudian menunjang pembangunan di berbagai sektor akan mewujudkan kesejahteraan bagi manusia yang berada dalam wilayah pemerintah tersebut. Pembanguna manusia merupakan hal yang penting terutama bagi sebagian negara khususnya negara yang sedang berkembang hal ini disebabkan karena banyak negara dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi namun gagal dalam menghadapi masalah kesenjangan sosial dan meningkatnya kemiskinan, selain itu pembangunan manusia sebenarnya merupakan investasi tidak langsung terhadap pencapaian tujuan perekonomian nasional.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

2.1.6 Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah upaya membangun dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya (berupa sandang, pangan) sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam artian bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Suharto (dalam Pawalin 2017: 24).

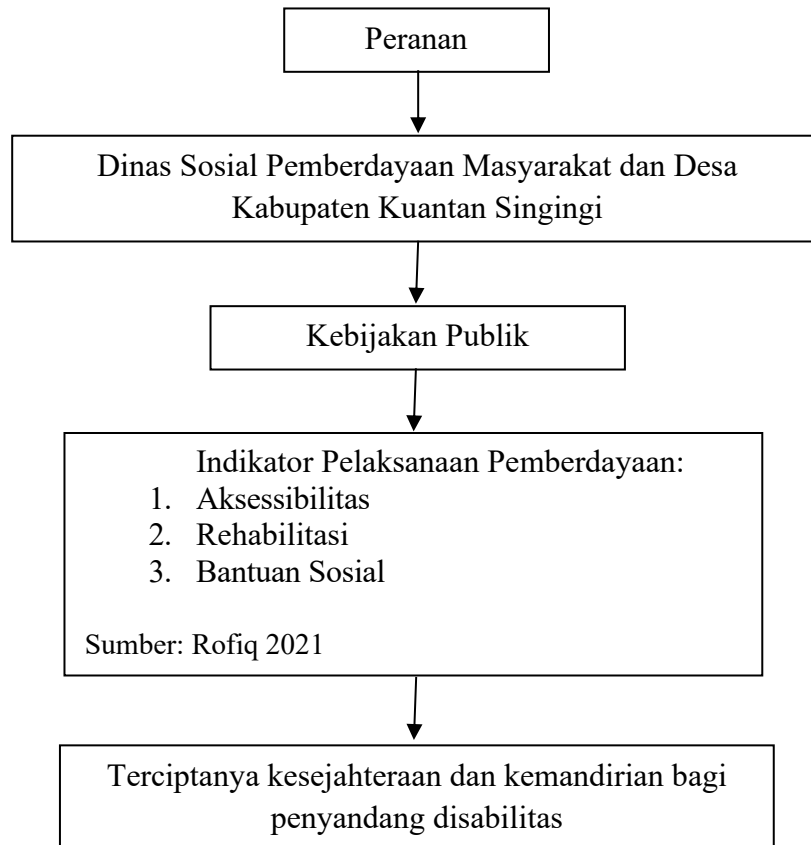
2.1.7 Penyandang Disabilitas

Masyarakat mengenal istilah disabilitas atau difabel sebagai seseorang yang menyandang cacat. masyarakat kebanyakan mengartikan penyandang disabilitas sebagai individu yang kehilangan anggota atau struktur tubuh seperti kaki/tangan, lumpuh, buta, tuli, dan sebagainya. Menurut definisi yang diberikan oleh *World Health Organization* (WHO), disabilitas adalah keterbatasan atau kurangnya kemampuan organ sehingga mempengaruhi kemampuan fisik atau mental untuk menampilkan aktivitas sesuai dengan aturannya atau masih dalam batas normal, biasanya digunakan dalam level individu (Murtie 2016: 88).

Secara yuridis pengertian penyandang cacat diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Penyandang Cacat sebagai berikut: Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari Penyandang cacat fisik, Penyandang cacat mental, Penyandang cacat fisik dan mental

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1: Kerangka Pikir Penelitian



2.3 Defenisi Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini, maka berikut ini dijelaskan konsep yang digunakan sebagai acuan penelitian ini.

1. Aksesibilitas adalah ruang bebas hambatan/kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam berpartisipasi untuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum.
2. Rehabilitasi adalah proses optimalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu dan bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya Maksudnya adalah bantuan yang diberikan tiap tahunnya pasti akan berubah, penyandang disabilitas diberikan



bantuan sembako dan uang tunai tiga ratus ribu rupiah, bisa saja pada tahun berikutnya hanya sembako saja yang diberikan tidak beserta uang tunai.

2.4 Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
Pemberdayaan	Aksessibilitas	1. MenyediakanAksessibilitas yang berbentuk fisik. 2. Menyediakan aksessibilitas yang berbentuk non fisik	Baik Cukup Baik Kurang Baik
	Rehabilitasi	1. Memajukan ketersediaan, pengetahuan dan penggunaan alat bantu dan teknologi, didesain bagi penyandang disabilitas. 2. Melaksanakan rehabilitasi untuk mengoptimalkan dan mengembangkan fungsi fisik, mental dan sosial penyandang disabilitas.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
	Bantuan Sosial	1. Jenis bantuan yang diberikan 2. Pendataan bantuan sosial	Baik Cukup Baik Kurang Baik

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kaitan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif untuk menjelaskan dan menggambarkan mengenai Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Informan penelitian

Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.

No	Responden	Informan	ket
1.	Kepala Bidang Lindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial	1	20%
2.	Staf Bidang Lindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial	1	20%
3.	Penyuluh Sosial	1	20%
4.	Penyandang Disabilitas	2	40%



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Jumlah	5	100%
---------------	----------	-------------

(Sumber : Olahan Data Penelitian 2025)

3.3 Sumber Data

3.3.1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan oleh peneliti sebagai objek penulisan. Data primer diperoleh melalui teknik observasi, dan wawancara langsung dengan informen, yaitu Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi yang memfokuskan pada Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3.2. Data Sekunder

Data Sekunder ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap Banyak buku, karya ilmiah dan dokumentasi terhadap catatan penting dan dokumen-dokumen administrasi yang dimiliki Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan kepada kajian Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

3.5 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian tempat penulis melakukan penelitian ini adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi. Peneliti mengambil penelitian ditempat tersebut dengan pertimbangan bahwa penulis melihat ada sebuah permasalahan yang terjadi terkait Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang ada di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6 Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk mempelajari catatan resmi mengenai gambaran Umum Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6.2 Wawancara

Sutrisno Hadi (dalam Sugiono, 2017:157) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode



interview (wawancara) adalah sebagai berikut 1. Bahwa subjek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri, 2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya, 3. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan- pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti. Disini Peneliti melakukan wawancara dengan bertanya secara langsung kepada responden, mengenai hal-hal yang menunjang terkait pembinaan Penyandang Disabilitas yang ada di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6.3 Observasi

Sutrisno Hadi (dalam Sugiono, 2017:166) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi yang dilakukan adalah non partisipatif.

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian dan laporan yang lengkap dan terperinci, jawaban yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan berdasarkan pertanyaan, reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses pengumpulan data.

3.7.2 Penyajian data

Sugiono (2015:373) mengemukakan penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3.7.3 Triangulasi Data

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi, dan dokumen.

3.7.4 Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis data yang ada kemudian diwujudkan dalam kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk melihat hasil penelitian lebih sempurna dan maksimal terhadap Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pemberdayaan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Penyandang Disabilitas di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti dengan sengaja turun ke lapangan untuk melakukan wawancara atau tanya jawab langsung dengan informan yang telah ditentukan, serta dengan memberikan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Indikator Aksesibilitas

Dari wawancara diatas kesimpulan yang saya ambil yaitu dalam hal akses untuk sarana dan prasarana umum dan juga pelayanan yang diprioritaskan yang diberikan khusus bagi para penyandang disabilitas dalam bentuk fisik dan juga non fisik yang diberikan sudah baik. Dengan demikian pertanyaan yang telah peneliti pertanyakan secara langsung kepada informan, terkait indikator aksesibilitas termasuk dalam kategori sudah baik. Dari hasil wawancara peneliti tentang indikator aksesibilitas ini adalah peneliti menemukan jawaban dari setiap informan dimana dalam indikator aksesibilitas suatu pelayanan dilakukan sudah baik. Karena dari pihak Dinas Sosial sudah menyediakan kemudahan bagi penyandang disabilitas yang ingin berurusan ke Dinas Sosial seperti sudah tersedianya kursi roda, jalur khusus disabilitas tongkat dan juga pendampingan kepada penyandang disabilitas yang ingin berurusan ke Dinas Sosial sehingga terciptanya lingkungan yang inklusif dan setara bagi semua orang dan juga penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang sama untuk mengakses informasi, layanan dan juga lingkungan.

Indikator Rehabilitasi

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan beberapa informan kesimpulan yang saya ambil yaitu tentang indikator rehabilitasi sudah baik dimana dari Instansi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah memberikan pengetahuan maupun pelatihan yang bermanfaat terhadap penyandang disabilitas. Dari pertanyaan yang ada untuk indikator Rehabilitasi ,hasil wawancara dapat diketahui bahwa rehabilitasi dalam rangkaian program pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan singingi sudah dilakukan dengan baik. dimana rehabilitasi merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan seperti yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi rehabilitasi dilakukan dengan cara mengajak kepada penyandang disabilitas untuk menuju perilaku yang lebih baik, merubah pola pikir atau midset dan juga menambah keahlian-keahlian dibidang tertentu supaya lebih percaya diri dalam menjalani kehidupan dengan memberikan pelatihan pengembangan diri untuk melakukan adaptasi dan mencari relasi pertemanan dengan sebanyak-banyak dan tak hanya itu dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi juga membantu para pengangguran nantinya untuk mendapatkan informasi-informasi lowongan pekerjaan.

Indikator bantuan sosial

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan beberapa informan kesimpulan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

yang saya ambil yaitu tentang indikator bantuan sosial sudah baik dimana dari Instansi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah mendata secara langsung dan juga turun kelapangan secara langsung dalam rangka pemberdayaan penyandang disabilitas selain itu juga memberikan bantuan sosial baik itu berupa bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas maupun kebutuhan pokoknya yang berupa beras, minyak, gula dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dari pertanyaan yang ada untuk indikator bantuan sosial, hasil wawancara dapat diketahui bahwa bantuan sosial dalam rangkaian program pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilakukan dengan baik. Dari hasil wawancara peneliti tentang indikator bantuan sosial ini adalah peneliti menemukan jawaban dari setiap informan dimana pada item pertanyaan jawaban dari para aparatur Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi rata-rata jawaban yang sama dan tidak jauh berbeda yaitu semua aparatur menjawab sudah dilakukan dengan baik dalam pemberian bantuan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi terkait Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi maka dapat diketahui bahwa pemberdayaan yang meliputi aksesibilitas, rehabilitasi dan bantuan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dapat dinilai dalam kategori cukup baik.

SARAN

Setelah melihat hasil penelitian ini maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran dalam Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi untuk dapat melakukan Pemberdayaan lebih intensif dan terarah kepada penyandang disabilitas yang ada di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abidin, Said Zainal. 2019. *Kebijakan Publik*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Humanika.

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

- Harahap, Febri, 2022. *Peranan Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Di Kota Medan*. Skripsi: Universitas Medan Area, Medan.
- Isnaini, Zuhrotul Kholidah. 2021. *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Disabilitas Di Kabupaten Probolinggo*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Kh. Achmad Siddiq Jember, Probolinggo.
- Jamaluddin (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi* (Cetakan 1). Yogyakarta: Gava Media.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh Publishing. Pekanbaru
- Murtie, Afin. 2016. *Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta. Maxima.
- Pasolong, Harbani, 2014 *Teori Administrasi Publik Bandun*, Alfabeta
- Pawalin, Oca. 2017. *Peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas*. Skripsi: Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Prof Dr Sugiono, 2017. *Metode Penelitian administrasi*. CV Alfabeta Bandung.
- Rauf dan Munaf, Yusri. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*. Pekanbaru: Zanafafa Publishing.
- Rofiq, Rifa'i. 2021. *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim, Pekanbaru
- Salminita. 2021. *Analisis Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Riau*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Syafhendry dan Delpi Susanti. 2018. *Evaluasi Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu*. Kajian Pemerintahan, Vol IV(1), Maret 2018
- Syafiie, Inu Kencana dan Walasari. 2015. *Ilmu Administrasi Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syobah, Nurul. 2018. *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur*. Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Vol. 15. No. 2



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Thaufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Moestopi Beragama Pers

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: Lukman offset

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.